

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

ANDRE JULIUS HUTASOIT^{1*}

NIM. E1012161118

Hardilina² Hairil Anwar²

* Email: andre_ian2016@student.untan.ac.id

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Pontianak belum optimal. Terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang tersedia menjadikan permasalahan bagi para pedagang kaki lima untuk diberdayakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, dilihat dari teori yang dikemukakan oleh George Edward III (Widodo, 2011:96) ada 4 (empat) variabel faktor penyebab kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak belum optimal yaitu: 1). Komunikasi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan, 2). Sumber Daya. Kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, 3). Disposisi. Sikap target sasaran yang kurang mendukung dan 4). Struktur Birokrasi. SOP yang diterapkan tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan prosedur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan terkait dengan kebijakan ini, kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, sikap target sasaran yang kurang mendukung, dan SOP yang diterapkan tidak berjalan dengan optimal. Saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan untuk para implementor meningkatkan lagi sosialisasi, menambah SDM dalam implementasi kebijakan, membuat target sasaran mendukung kebijakan dan mengoptimalkan SOP yang sudah diterapkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang baik dalam hidupnya dan mempunyai kehidupan yang layak untuk kesejahteraannya bersama keluarga. Namun faktanya tidak semua mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang tidak memadai, ketimpangan pembangunan secara geografis yang meningkatkan urbanisasi, dan lain sebagainya. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak. Hal itulah kemudian mendorong tumbuh suburnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Salah satu bentuk yang populer di Indonesia adalah pedagang kaki lima (PKL), yang dalam perkembangannya seperti buah simalakama, dibutuhkan

sekaligus menimbulkan permasalahan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka sebagian para penganggur terjun dalam kegiatan sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga peranan sektor informal menyerap PKL menjadi urgen sebagai upaya untuk bertahan hidup.

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi pembentukan perundang-undangan dan sekaligus mengatur pertumbuhan ekonomi sekiranya bisa mengatasi permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat, yakni masalah perekonomian rakyat. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru melemahkan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan

dilanjutkan dengan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Pontianak yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 24 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pada dasarnya pelaksanaan pemberdayaan terhadap PKL masih dilaksanakan secara Insidental dalam arti tidak secara tetap atau rutin. Kegiatan pemberdayaan ini terfokus pada upaya penataan dan pengendalian yang berada dibawah kendali DISKUMDAG (Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan) serta Satpol PP yang didalam tugas pokok dan fungsinya juga menyangkut keamanan dan ketertiban di wilayah kota Pontianak, belum ada yang menguntungkan pedagang secara keseluruhan. Sedangkan pola pemberdayaan yang ada masih terkesan belum terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana dan SDM aparatur yang tersedia jika dibandingkan dengan luas wilayah yang dipergunakan sebagai kawasan usaha bagi pedagang kaki lima.

Kota Pontianak Terdapat 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Kecamatan Pontianak Barat merupakan salah satu kecamatan yang banyak dipenuhi oleh para PKL khususnya di Daerah Sungai Jawi, karena padat oleh para PKL menjadikan banyaknya PKL yang tidak berdaya karena kurangnya dana, pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui DISKUMDAG menjadikan banyaknya para PKL yang belum diberdayakan oleh kebijakan pemerintah daerah tersebut. Sungai Jawi/ Kecamatan Pontianak Barat merupakan salah satu lokasi dimana banyaknya PKL yang masih belum diberdayakan oleh kebijakan pemerintah daerah melalui DISKUMDAG. Pada dasarnya para PKL yang berdagang disana hanya berjualan melalui keterampilan yang minim karena tidak ada pelatihan atau bimbingan dari pemerintah

daerah melalui DISKUMDAG kepada para PKL dan kurangnya lahan untuk berjualan sehingga kesulitan para pedagang semakin bertambah. Data menunjukkan di Kecamatan Pontianak Barat terdapat 97 jumlah PKL yang berdagang di Sungai Jawi/ Kecamatan Pontianak Barat.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh

unit administratif atau unit birokratif.

Model implementasi menurut Edward III (Widodo, 2011:96) mengajukan empat faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Empat faktor itu antara lain yaitu:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan

sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan fragmentasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operation Procedure (SOP) atau pedoman pelaksanaan kegiatan dimaksud yang menjadi acuan bagi setiap implementor untuk bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah fragmentasi, fragmentasi atau tersebar nya tanggung jawab kebijakan ke dalam unit-unit organisasi. Hal ini diharapkan akan mempermudah pelaksana kebijakan

karena dengan demikian implementasi kebijakan dapat dilaksanakan oleh berbagai unit-unit pemerintahan, namun dengan tetap pada kontrol yang sama agar kebijakan yang dilaksanakan tidak keluar jalur yang telah ditetapkan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dapat dikaitkan dengan model Implementasi Kebijakan menurut George Edward III (Widodo, 2011:96) yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan model Implementasi kebijakan menurut George Edward III ini dapat mendukung berjalannya proses penelitian kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan

mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Pada pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpanan hubungan fenomena-fenomena penelitian yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Sumber atau sasaran dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga sumber atau sasaran ini menjadi subjek penelitian yang dapat memberikan data dan informasi yang benar atau faktual. Sumber penelitian adalah Kepala UPT Pengelolaan Pasar Tradisional, Kepala Seksi UKM dan 3 orang para pedagang kaki lima yang berada di Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat. Sedangkan objeknya adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pontianak.

Metode yang digunakan dalam pengolahan data menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data

yang dilapangan lalu diklarifikasikan berdasarkan kategori hasil penelitian. Dalam penafsiran dilakukan secara komperatif berdasarkan teori-teori yang mendukung, kemudian ditarik kesimpulan. Berhubung penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah non statistik, artinya dalam proses analisis dengan mendeskripsikan hasil penelitian sesuai fakta di lapangan.

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data, peneliti mengecek ulang informasi yang diterima dan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang ada di DISKUMDAG. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber yang dipercaya, sedangkan triangulasi teknik peneliti menguji dengan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian di DISKUMDAG Kota Pontianak untuk mengamati langkah perencanaan yang dilakukan untuk pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak Barat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi pembentukan perundang-undangan dan sekaligus mengatur pertumbuhan ekonomi sekiranya bisa mengatasi permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat, yakni masalah perekonomian rakyat. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru melemahkan masyarakat. Kebijakan ini dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang kemudian dijabarkan

lebih jelas lagi dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kemudian kebijakan tersebut juga diturunkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 24 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Dengan dibuatnya kebijakan tersebut maka diharapkan para pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Pontianak Barat mendapatkan legalitas hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha di lembaga keuangan yang telah bekerja sama dengan pemerintah, hal ini dalam rangka meningkatkan usaha tersebut semakin berkembang dan mampu bersaing ditengah majunya dunia perekonomian.

Suatu kebijakan juga harus dipahami bukan sebagai persoalan yang ringan. Untuk membuat suatu kebijakan sekalipun itu kebijakan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh yang luas dan menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau

wilayah yang besar. Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama juga terjadi bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasinya karena dihadapkan dalam berbagai kesulitan atau hambatan.

Perlu adanya kesamaan sikap atau perspektif antara pengambil kebijakan dengan para implementor kebijakan. Dikatakan bahwa para pelaku implementor secara umum mempunyai kemungkinan menyimpang dalam sikap dan perspektifnya tentang kebijakan, dan hal ini dapat menjadi penghambat utama bagi keefektifan kinerja implementasi kebijakan.

Temuan penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor kurang optimalnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan pedagang kaki lima di Daerah Sungai Jawi Di Kecamatan Pontianak Barat. Untuk mendapatkan gambaran proses yang dilakukan oleh DISKUMDAG peneliti menggunakan teori model

implementasi oleh Edward III (Widodo, 2011). Yang mengajukan empat faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi disini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan yang dikerjakan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keoptimalan aspek komunikasi yaitu:

a. Trasmisi

Trasmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi kebijakan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan tidak terjadi, artinya penyampaian suatu informasi tidak sampai pada tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini transmisi dapat diaplikasikan salah satunya dalam bentuk sosialisasi

sebagai bentuk wujud jembatan yang menjadi penghubung antara pihak implementor dengan sasaran kebijakan. Apabila sosialisasi dapat berjalan dengan baik maka implementasi suatu kebijakan akan berjalan baik pula.

Proses komunikasi dalam aspek transmisi tersebut dapat dilihat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai pelaksana teknis dan pelaksana pelayanan.

Temuan penelitian menyatakan Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui informasi dari adanya kebijakan pemberdayaan yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima yang dijalankan, dapat dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak Barat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut. Hal ini seharusnya dapat diatasi dengan sosialisasi yang diberikan pemerintah Kota Pontianak kepada para pedagang

kaki lima yang ada di Kota Pontianak.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan.

Mensosialisasikan suatu kebijakan diperlukan kejelasan informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan secara komunikatif. Dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tidak melakukan sosialisasi secara khusus terkait pemberdayaan pedagang kaki lima.

Temuan dari hasil penelitian menyatakan bahwa kejelasan dari komunikasi dalam kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima

yaitu, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak selaku pelaksana teknis sudah mengetahui dengan jelas tentang kebijakan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Tetapi didalam kejelasan komunikasi dari Dinas kepada pedagang kaki lima masih belum optimal, karena masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang pemberdayaan pedagang kaki lima dan tidak mendapatkan informasi serta pemahaman yang jelas terkait kebijakan pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

c. Konsistensi

Pada aspek konsistensi perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dalam melaksanakan kegiatan dilapangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak harus konsisten dengan keputusan yang dibuat agar

penerapannya dapat meminimalisir kesalahan yang ada, termasuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

Dari 3 aspek komunikasi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan pihak implementor belum terlaksana dengan baik atau dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat terlihat dalam aspek transmisi dan kejelasan yang belum optimal dilakukan atau disampaikan, dan belum konsisten dalam penyampaian informasi kepada target sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya disini merupakan variabel kedua yang penting, karena ketika didalam sebuah organisasi mempunyai kebijakan yang bagus dan juga sosialisasinya baik, tetapi tidak disertai dengan sumber daya yang baik maka hal itu juga akan memperlambat kerja organisasi tersebut. Begitu juga implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima, perlu adanya sumber daya yang memadai, sumber daya disini juga akan menjadi pendukung keberhasilan dari kebijakan

pemberdayaan pedagang kaki lima ini.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan, selain itu SDM juga turut menentukan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi, terutama organisasi yang melayani kepentingan publik. SDM dalam melaksanakan pelayanan publik mempunyai pengaruh besar agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Jika dalam pelayanan publik mempunyai kemampuan, kecakapan, keahlian dan pendidikan yang baik maka besar kemungkinan sebuah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika pelayanan publik yang SDM-nya tidak memiliki keterampilan dan keahlian maka akibatnya adalah jalannya proses pelayanan tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tidak pernah adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait para pedagang yang

telah diberdayakan dan belum diberdayakan yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Kurangnya sumber daya manusia pada seksi pengawasan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berakibat pada kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap para pedagang kaki lima. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong masih banyaknya para pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak barat tidak diberdayakan dengan baik sesuai kebijakan yang sudah dilakukan.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi. Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat menunjang implementasi kebijakan tersebut. Ketersediaan fasilitas dapat memudahkan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Implementor mungkin memiliki staf yang mempuni, mengerti akan tupoksi dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas sebagai penunjang maka implementasi tersebut tidak

akan berhasil. Terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh implementor berdampak pada kurang optimalnya implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas tahun ini masih belum diketahui adanya bantuan fasilitas fisik untuk para pelaku usaha UMKM dikarenakan banyaknya dana yang dialihkan untuk Covid-19. Tetapi ditahun-tahun sebelumnya ada bantuan fasilitas fisik seperti tabung gas, gerobak, etalase dan kompor.

c. Informasi dan Kewenangan

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa masing-masing pelaksana dari kebijakan pemberdayaan sudah mendapatkan informasi yang jelas tentang

bagaimana cara melaksanakan kebijakan tersebut, dimana masing-masing pelaksana mengetahui apa tugas dan fungsi yang harus mereka lakukan, dan dalam memahami kebijakan pemberdayaan masing-masing pelaksana tidak ada yang salah dalam memaknai kebijakan yang dilaksanakan.

Masing-masing pelaksana kebijakan pemberdayaan memiliki kewenangan yang berbeda-beda, tetapi di dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tetap saling berkaitan. Dan para pelaksana tidak merasakan kekurangan atau kelebihan wewenang yang dijalankan, karena memang sudah sesuai dengan dinas tersebut.

Kesimpulan untuk sumber daya yang merupakan variabel penentu berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima, dapat dikatakan berhasil. Karena hanya aspek sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai atau belum optimal, sedangkan aspek fasilitas, dan aspek informasi dan wewenang

menunjukkan hal positif karena informasi sudah diketahui dengan jelas oleh implementor, wewenang yang dimiliki juga sudah sesuai dengan bagian masing-masing pelaksana, dan fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama pelayanan pemberdayaan pedagang kaki lima juga sudah terpenuhi atau memadai.

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pada variabel disposisi ini juga terdapat 2 aspek yang harus diperhatikan yaitu pengangkatan pelaksana dan insentif. Pengangkatan pelaksana atau pemilihan personil haruslah orang yang memiliki dedikasi yang tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dan insentif yaitu dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi.

a. Pengangkatan personil

Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan, bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Prosedur pengangkatan pelaksana dilakukan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, jadi implementor yang bertugas dilapangan hanya menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas. Para pelaksana tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan personil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada aspek pengangkatan personil para pelaksana mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan tersebut, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan personil karena itu merupakan kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

b. Insentif

Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi

insentif oleh para pembentuk kebijakan tingkat tinggi besar kemungkinan mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kecenderungan pelaksana, pengangkatan personil dan insentif, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana menunjukkan respon yang positif terhadap kebijakan pemberdayaan, dengan kata lain para pelaksana yang terkait langsung dengan kebijakan ini memberikan dukungan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel keempat yang berperan penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Pada dasarnya pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai keinginan serta sumber-sumber yang memadai untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka masih dihambat oleh struktur-struktur birokrasi dimana mereka menjalankan kebijakan tersebut, hal ini juga membuat kurang

optimalnya suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu SOP dan Fragmentasi.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Aspek pertama dalam struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP atau pedoman pelaksanaan kegiatan dimaksud yang menjadi acuan bagi setiap implementor untuk bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan infoman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dari kebijakan pemberdayaan, SOP yang dijalankan tidak selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu 2 hari kerja karna terdapat kendala dari sistem online dan pandemi yang menyebabkan SOP tersebut tidak berjalan seperti biasanya.

b. Fragmentasi

Aspek kedua dalam struktur birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi atau tersebaranya

tanggung jawab kebijakan ke dalam unit-unit organisasi. Hal ini diharapkan akan mempermudah pelaksana kebijakan karena dengan demikian implementasi kebijakan dapat dilaksanakan oleh berbagai unit-unit pemerintahan, namun dengan tetap pada kontrol yang sama agar kebijakan yang dilaksanakan tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Permasalahan yang sering timbul dengan fragmentasi adalah kesulitan didalam melakukan koordinasi antar unit.

Dari kedua aspek dalam variabel struktur birokrasi yaitu SOP dan Fragmentasi menunjukkan bahwa SOP yang diterapkan belum optimal dilaksanakan sedangkan fragmentasi yang diterapkan sudah berjalan optimal, karena SOP yang dijalankan selama 2 hari kerja di dalam pengurusan berkas untuk mendapatkan bantuan modal belum optimal dilaksanakan karena terdapat beberapa kendala yang membuat pengurusan tidak selesai dalam 2 hari. Sedangkan fragmentasi yang dilaksanakan tidak terdapat kendala karena setiap

pelaksana sudah mengetahui apa tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Barat masih belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari masih banyaknya para pedagang kaki lima di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Barat yang tidak mengetahui kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima tersebut. Adapun faktor masih banyaknya pelaku usaha pedagang kaki lima yang belum diberdayakan disebabkan oleh:

a. Komunikasi

Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan pihak implementor belum terlaksana dengan baik atau dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat terlihat dalam aspek transmisi dan kejelasan yang belum optimal dilakukan atau

disampaikan, dan belum konsisten dalam penyampaian informasi kepada target sasaran kebijakan.

b. Sumber Daya

Kesimpulan untuk sumber daya yang merupakan variabel penentu berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima, dapat dikatakan berhasil. Karena hanya aspek sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai atau belum optimal, sedangkan aspek fasilitas, dan aspek informasi dan wewenang menunjukkan hal positif karena informasi sudah diketahui dengan jelas oleh implementor, wewenang yang dimiliki juga sudah sesuai dengan bagian masing-masing pelaksana, dan fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama pelayanan pemberdayaan pedagang kaki lima juga sudah terpenuhi atau memadai.

c. Disposisi

Dapat disimpulkan bahwa para pelaksana menunjukkan respon yang positif terhadap kebijakan pemberdayaan, dengan kata lain para pelaksana yang terkait

langsung dengan kebijakan ini memberikan dukungan.

d. Struktur Birokrasi

Dari kedua aspek dalam variabel struktur birokrasi yaitu SOP dan Fragmentasi menunjukkan bahwa SOP yang diterapkan belum optimal dilaksanakan sedangkan fragmentasi yang diterapkan sudah berjalan optimal, karena SOP yang dijalankan selama 2 hari kerja di dalam pengurusan berkas untuk mendapatkan bantuan modal belum optimal dilaksanakan karena terdapat beberapa kendala yang membuat pengurusan tidak selesai dalam 2 hari. Sedangkan fragmentasi yang dilaksanakan tidak terdapat kendala karena setiap pelaksana sudah mengetahui apa tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang disajikan yaitu, perlu adanya sosialisasi secara khusus dilakukan untuk memberitahukan kepada para pedagang kaki lima tentang

kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Untuk mengatasi sumber daya, diperlukan adanya penambahan staf pada seksi pengawasan. Seksi pengawasan berperan cukup penting untuk mengawasi para pedagang kaki lima. Dengan kurangnya staf pada seksi pengawasan tentunya menghambat tugas pokok dan fungsi dari pelaksana teknis kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Untuk disposisi dari implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima, dari segi pelaksana diperlukan sikap konsistensi dari pelaksana kebijakan, baik itu pelaksana dalam bentuk pelayanan maupun pelaksana teknis dari kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Struktur birokrasi mempunyai peran penting dalam suatu implementasi untuk mengatur jalannya sebuah kebijakan. Ketika di dalam suatu organisasi SOP sudah berjalan dengan baik tentunya

hal tersebut juga memberikan dampak yang baik. Diperlukan peningkatan lagi agar SOP yang di terapkan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah dijalankan yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap website yang telah ada supaya dapat berjalan dengan baik dan pelaku usaha yang sudah mengajukan berkas pengajuan bantuan modal bisa segera mendapatkan bantuan modal.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. AIPI Bandung.
- Agustino. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*.
- Danim, S., Kualitatif, M. P., & Metodologi, A. (2002). *Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial. Pendidikan dan Humaniora*, Penerbit Pustaka Setia Bandung.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM PRESS.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.

- Nawawi, I. (2009). *Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul. (1997). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo, E., Tangkilisan, H. N. S., & Bahri, T. S. (2004). *Kebijakan publik dan budaya*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Undang-Undang dan Perda:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.